

**AKUNTABILITAS ANGGARAN OPERASIONAL
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBERANG ULU 1
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik*



Diajukan oleh :

**MILA OKTARINA
07011281520213**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINITRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS ANGGARAN OPERASIONAL KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015-2017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MILA OKTARINA
07011281520213

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

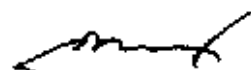
Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19961230 199203 2001



Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Oktarina

Nomor Induk Mahasiswa : 07011281520213

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 1997

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Program Kekhususan : Administrasi Keuangan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



Mila Oktarina

NIM. 0701128152013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2017" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Januari 2021.

Palembang, 13 Januari 2021

Ketua

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19961230 199203 2001



Anggota

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001
3. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 19580609 198403 1002
4. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 19671201 199203 2002



Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kiyas Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19810827 200912 1002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah”.

-Q.S. An-Nisa:135-

Atas Ridho Allah Subhanawata’ala, skripsi ini
kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Erwin Alamsyah dan Megawati. Adik-adikku tersayang, Rama, Fajri dan Nanda serta seluruh keluarga besarku.
2. Kakak senior pramukaku yang telah berjasa
3. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuanganku Administrasi Publik .
4. Serta Almamaterku yang kubanggakan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 memiliki anggaran operasional yang digunakan untuk keperluan operasional seperti belanja bahan, perjalanan dinas, biaya internet dan telepon, air, listrik (TAL). Namun anggaran operasional yang telah dianggarkan oleh Kementerian Agama tersebut mengalami defisit. Konsep yang digunakan adalah tiga aktivitas dari Schacter yang meliputi aktivitas informasi, aktivitas tindakan dan aktivitas tanggapan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada aktivitas informasi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 lebih mengutamakan ketepatan waktu baik dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban. Sementara itu, informasi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 belum bisa diandalkan karena belum lengkap sehingga tidak bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan masa yang akan datang. Informasi perencanaan anggaran juga belum akurat dibuktikan dengan defisitnya anggaran saat dilaksanakan dan dokumen pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan format dan substansi yang berlaku. Pada aktivitas tindakan, perencanaan anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang dianggap sebatas pemenuhan persyaratan pencairan bantuan biaya operasional sehingga pelaksanaan anggaran operasional tidak dikerjakan secara proposional dan terarah. Pada aktivitas tanggapan, Kementerian Agama telah merespon permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Respon Kementerian Agama, yaitu melakukan sosialisasi bantuan biaya operasional, menaikkan jumlah bantuan biaya operasional dan memberikan nilai hukum pada dokumen pertanggungjawaban agar dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.

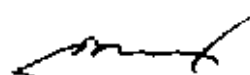
Kata Kunci : *Akuntabilitas, Aktivitas, Informasi, Relevan, Tindakan, Tanggapan*

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19961230 199203 2001

Indralaya, 13 Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19810827 200912 1002

ABSTRACT

This study aims to determine the Accountability of the Operational Budget of the Office of Religious Affairs Seberang Ulu 1 Palembang City. The Seberang Ulu 1 Religious Affairs Office has an operational budget that is used for operational needs such as material shopping, official travel, internet costs for SIMBI applications and telephone, water, electricity. But the operational budget that has been budgeted by the Ministry of Religion has a deficit. The concept used is the three activities of Schacter which include information activities, action activities and response activities. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques consist of documentation, interviews and observations. The results of the study found that the information activities of the Office of Religious Affairs Seberang Ulu 1 prioritize timeliness both in planning, implementation or accountability. Meanwhile, information on the Office of Religious Affairs of Seberang Ulu 1 cannot be relied on because it is incomplete so that it cannot be used as material for future decision making. Budget planning information is also not accurately proven by the budget deficit when it is implemented and the accountability documents are made not in accordance with the format and substance in force. In action activities, the budget planning of the Seberang Ulu 1 Office of Palembang City is considered to be limited to meeting the requirements for disbursing operational costs so that the implementation of the operational budget is not carried out proportionally and directed. In response activities, the Ministry of Religion has responded to the problems faced by the District Religious Affairs Office. The Ministry of Religion's response, which is to socialize operational cost assistance, increase the amount of operational cost assistance and provide legal value on the accountability documents so that they are made in accordance with applicable regulations.

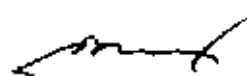
Keywords : *Accountability, Operational, Budgeting, Activites, Information, Action, Response*

1st Advisor



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19621125 198912 1001

2nd Advisor



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19961230 199203 2001

Indralaya, 13 Januari 2021
Chief of Publik Administration Departement
Facultry of Social and Political Science



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19810827 200912 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akuntabilitas Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2017”**. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena banyak bantuan dari banyak pihak, oleh sebab itu Penulis menyampaikan rasa penghormatan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Erwin Alamsyah T. dan Mega Wati yang selalu mendoakanku, mendidikku, mendukung moril dan materil dan memberiku semangat dalam suka maupun duka.
2. Saudara dan Saudariku, Rama Wijaya, M. Al-Fajri, dan Selvi Ananda yang telah memberikan doa dan semangat untuk keberhasilan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa dan motivasi.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor UNSRI.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.si selaku Dekan FISIP UNSRI.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberi dukungan.
8. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan semangat selama penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak bantuan.
10. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama masa perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP UNSRI yang telah mendukung penulisan skripsi ini.
11. Seluruh pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

12. Seluruh Pegawai di Kementerian Agama Kota Palembang.
13. Sahabat-sahabatku yang selalu menjadi teman berbagi dan penyemangat setiap saat, Indri Amrina Rossada, Kartika Dwi Shinta, Dewi Shinta, Putri Destiansy, Andi Kurniawan.
14. Kakak Pembina dan Kakak Senior Pramukaku yang telah memberikan motivasi, Rizki Noval dan Agus Adi Putra.
15. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Negara 2015 yang selalu menemani hari-hariku dalam menjalani kehidupan sebagai Mahasiswa.
16. Almamater kebanggaanku.

Akhir kata Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah senantiasa meridhoi segala usaha kita. Aamiin.

Indralaya, 27 Juli 2020

Mila Oktarina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat	6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	
2.1.1. Anggaran Operasional	8
2.1.2. Akuntabilitas	14
2.1.3. Konsep Akuntabilitas	15
2.2 Konsep Akuntabilitas yang Digunakan dalam Penelitian Ini	19
2.3 Alur Siklus Akuntabilitas Menurut Schater (2000:3)	24
2.4 Penelitian Terdahulu	24
2.5 Siklus Akuntabilitas Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang	27

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Definisi Konsep	28
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data	33
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Pedoman Wawancara	36
3.9 Pedoman Observasi	37

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	38
4.1.1	Kondisi Fisik Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	38
4.1.2	Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	39
4.1.3	Motto, Visi, dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	40
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang	40
4.1.5	Daftar Pegawai dan Pembagian Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	41
4.1.6	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1	48
4.1.7	Alokasi Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan	49
4.1.8	Sistem Pencairan Anggaran Kantor Urusan Agama Kecamatan	50
4.2	Hasil dan Pembahasan	50
4.2.1	Analisis Aktivitas Informasi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang.....	50
A.	Analisis Aktivitas Informasi Tahap Perencanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang.....	51
1.	Analisis Relevan Pada Tahap Perencanaan	51
2.	Analisis Akurat Pada Tahap Perencanaan	56
3.	Analisis Tepat Waktu Pada Tahap Perencanaan	58
4.	Analisis Komprehensif Pada Tahap Perencanaan	60
B.	Analisis Aktivitas Informasi Tahap Pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang.....	64
1.	Analisis Relevan Pada Tahap Pelaksanaan	64
2.	Analisis Akurat Pada Tahap Pelaksanaan	65
3.	Analisis Tepat Waktu Pada Tahap Pelaksanaan	68
4.	Analisis Komprehensif Pada Tahap Pelaksanaan	73
C.	Analisis Aktivitas Informasi Tahap Pertanggungjawaban Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang.....	78
1.	Analisis Relevan Pada Tahap Pertanggungjawaban	78
2.	Analisis Akurat Pada Tahap Pertanggungjawaban	80
3.	Analisis Tepat Waktu Pada Tahap Pertanggungjawaban	83
4.	Analisis Komprehensif Pada Tahap Pertanggungjawaban	87
4.2.2	Analisis Aktivitas Mengembangkan Tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang	98
A.	Analisis Akuntabilitas Aktivitas Tindakan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang	98
1.	Analisis Mengembangkan Tindakan Pada Tahap Perencanaan	98
2.	Analisis Mengembangkan Tindakan Pada Tahap Pelaksanaan	100
3.	Analisis Mengembangkan Tindakan Pada Tahap Pertanggungjawaban	102
4.2.3	Analisis Aktivitas Tanggapan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang.....	104
B.	Analisis Akuntabilitas Aktivitas Tanggapan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang	105
1.	Analisis Respon Pada Tahap Perencanaan	105
2.	Analisis Respon Pada Tahap Pelaksanaan	107
3.	Analisis Respon Pada Tahap Pertanggungjawaban	109

BAB V	
PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 2015-2017	2
Tabel 2. Rincian Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun 2015-2017	3
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4. Fokus Penelitian	27
Tabel 5. Daftar Pegawai KUA Seberang Ulu 1	41
Tabel 6. Alokasi BOP/Anggaran Operasional KUA SU 1 Kota Palembang	49
Tabel 7. Realisasi Anggaran BOP Tahun 2016	45
Tabel 8. Realisasi Anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 2015-2017	57
Tabel 9. Rincian Realisasi Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2017	60
Tabel 10. Penerimaan Anggaran Operasional KUA SU 1 Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2017	69
Tabel 11. Pelaksanaan Anggaran Operasional KUA SU 1 Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2017	71
Tabel 12. Pembayaran Kebutuhan Operasional KUA SU 1 Kota Palembang yang Terlambat	72
Tabel 13. Pertanggungjawaban Anggaran Operasional KUA SU 1 Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2017	74
Tabel 14. Tingkat Pendidikan Pegawai KUA SU 1 Kota Palembang	76
Tabel 15. Hasil Analisis Aktivitas Informasi Perencanaan Anggaran KUA SU 1 Kota Palembang	99
Tabel 16. Hasil Analisis Aktivitas Mengembangkan Tindakan Perencanaan Anggaran KUA SU 1 Kota Palembang	102
Tabel 17. Hasil Analisis Aktivitas Mengembangkan Tindakan Pertanggungjawaban Anggaran	104
Tabel 18. Perubahan Jumlah Bantuan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan	108
Tabel 19. Pembagian Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan	109

Tabel 20. Perubahan Jumlah Bantuan Biaya Operasional KUA Kecamatan Berdasarkan Tipologi	109
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Pencairan Anggaran BOP KUA Kecamatan	14
Gambar 2.	Siklus Akuntabilitas Menurut Schater	23
Gambar 3.	Siklus Akuntabilitas Anggaran Operasional KUA SU 1 Kota Palembang	42
Gambar 4.	Struktur Organisasi KUA SU 1 Kota Palembang	44
Gambar 5.	Mekanisme Pencairan Anggaran BOP KUA Kecamatan	47
Gambar 6.	Mekanisme Pencairan Anggaran BOP KUA Kecamatan	52
Gambar 7.	Rencana Anggaran Bulan November 2016 Sebagai Dokumen Pendukung Usulan Bantuan Biaya Operasional	54
Gambar 8.	Rencana Anggaran Operasional KUA Kecamatan Karangmoncol 1	55
Gambar 9.	Tenaga Kerja Honorer Sedang Membantu Kegiatan Administrasi	62
Gambar 10.	Contoh Buku Kas dan Laporan Pertanggungjawaban KUA SU 1 Kota Palembang	65
Gambar 11.	Formatan Buku Kas Umum Berdasarkan Juknis	65
Gambar 12.	Formatan Laporan Pertanggungjawaban BOP Berdasarkan Juknis	66
Gambar 13.	Dokumen Usulan Pencairan Dana Operasional Bulan November 2016	67
Gambar 14.	Dokumen Usulan Pencairan Dana Operasional Bulan Agustus 2016	68
Gambar 15.	Pegawai Operator KUA SU 1 Sedang Entri Data dalam Aplikasi SIMBI .	77
Gambar 16.	Tampilan Aplikasi SIMBI Kementerian Agama	77
Gambar 17.	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang	80
Gambar 18.	Dokumen Rencana Penggunaan Dana Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan	81
Gambar 19.	Dokumen Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran	82
Gambar 20.	Penjelasan Barang Operasional Lainnya	83

Gambar 21. Kuitansi Pembayaran Anggaran Operasional dari Kemenag Kota ke KUA Seberang Ulu 1 Kota Palembang	85
Gambar 22. Buku Kas Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1	85
Gambar 23. Bukti Pembayaran <i>Cleaning Service</i>	86
Gambar 24. Format dan Substansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOP KUA ...	88
Gambar 25. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOP KUA Seberang Ulu 1 Kota Palembang Bulan September 2016	90
Gambar 26. Perbandingan Laporan Realisasi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 dengan Kantor Urusan Agama Karangmoncol 1	91
Gambar 27. Format dan Substansi Buku Kas Umum Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan	92
Gambar 28. Format dan Substansi Buku Kas Umum Menurut Kementerian Keuangan RI	93
Gambar 29. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 2015-2017	94
Gambar 30. Format dan Substansi Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional KUA per bulan	95
Gambar 31. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 2015-2017	96
Gambar 32. Kuitansi atau Bukti Pembayaran Anggaran Operasional KUA SU 1	97
Gambar 33. Contoh Bukti Pembayaran yang Telah Disahkan oleh PPK Kemenag Kota Palembang	110

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Pedoman Observasi
- Lampiran 3. Realisasi Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Tahun 2015-2017
- Lampiran 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Lampiran 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 9. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10. Surat Balasan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1
- Lampiran 11. Perpanjangan Izin Penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1
- Lampiran 12. Surat Balasan Kementerian Agama Kota Palembang

DAFTAR SINGKATAN

BIMAS	: Bimbingan Masyarakat Islam
BOP	: Bantuan Operasional
Dirjen	: Direktur Jendral
Juklak	: Pentunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kemenag	: Kementerian Agama
KUA	: Kantor Urusan Agama
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RI	: Republik Indonesia
SIMBI	: Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SU	: Seberang Ulu
UP	: Uang Persediaan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesungguhnya aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan faktor kunci dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/ daerah (Banga 2017: 28). Sejak *good governance* di-*booming*-kan oleh *United Nation Development Program and World Bank*, akuntabilitas telah dijadikan salah satu patokan atau aspek penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pemanfaatan dana atau anggaran.

Menurut Shafritz dan Russel dalam Banga (2017: 139) akuntabilitas yang baik memiliki empat aspek, yaitu pertama, proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. Kedua, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program. Ketiga, kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Banga (2017: 138) akuntabilitas memiliki perangkat aspek sebagai berikut,

1. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan,
2. Adanya mekanisme pertanggungjawaban,
3. Adanya laporan tahunan,
4. Adanya laporan pertanggungjawaban periodeik,
5. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara.

Aspek-aspek akuntabilitas tersebut akan diterapkan pada semua instansi pemerintahan. Tidak terkecuali pada instansi pemerintah yang berada paling bawah

sekalipun akan tetap menggunakan akuntabilitas sebagai aspek penilaian anggaran. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berlandaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan .

Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 sendiri memiliki visi, yaitu terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif , sedangkan misinya, yaitu

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah;
3. Meningkatkan kualitas zakat, wakaf, dan ibadah sosial;meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab rukyat, dan kemitraan umat Islam;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.

Demi mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1, tentu saja setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan anggaran operasional. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan, anggaran operasional digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal yang mana setiap besarnya anggaran operasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan mendapatkan hak anggaran operasional

Rp 3.000.000 per bulan atau dengan kata lain Rp 36.000.000 per tahun. Sayangnya anggaran operasional yang telah ditetapkan selalu kekurangan atau mengalami defisit. Hal ini dibuktikan dari laporan penggunaan dana operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang sebagai berikut,

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase Penggunaan
2015	Rp 36.000.000	Rp 36.204.611	100,6%
2016	Rp 36.000.000	Rp 42.613.197	118,4%
2017	Rp 36.000.000	Rp 35.900.173	99,7%

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1, Tahun Anggaran 2015-2017

Dilihat dari tabel 1, sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 pagu anggaran tetap Rp 36.000.000 per tahun. Sedangkan realisasi mengalami turun naik, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 36.204.611 lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan drastis sebesar Rp 42.613.197 selanjutnya pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 35.900.173.

Data realisasi anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 menunjukkan persentase penggunaan anggaran pada tahun 2015 sebesar 100,6 persen, tahun 2016 sebesar 118,4 persen dan tahun 2017 sebesar 99,7 persen. Sementara itu, jika realisasi anggaran operasional dirincikan akan diperoleh sebagai berikut,

Tabel 2. Rincian Realisasi Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun 2015-2017

No.	Kebutuhan	2015	2016	2017
1.	Belanja Bahan	Rp 12.039.850	Rp 19.535.250	Rp 10.720.100
2.	Perjalanan Dinas	Rp 0	Rp 1.250.000	Rp 0
3.	Biaya Internet	Rp 3.638.161	Rp 2.416.407	Rp 3.857.519
4.	Biaya Telepon, Air, Listrik	Rp 13.326.600	Rp 8.611.540	Rp 14.122.554
5.	Honor Pramubakti	Rp 7.200.000	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000
	Jumlah	Rp 36.204.611	Rp 42.613.197	Rp 35.900.173

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1, Tahun Anggaran 2015-2017

Berdasarkan tabel 2, kebutuhan operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 setiap tahunnya tidak tetap. Tidak tetapnya kebutuhan operasional dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang besaran pembagian untuk setiap kebutuhan. Pada tahun

2015, kebutuhan yang paling besar diperuntukkan biaya telepon, air, dan listrik sebesar Rp 13.326.600. Pada tahun 2016, biaya untuk membayar honor pramubakti naik menjadi sebesar Rp 10.800.000, padahal sebelumnya sebesar Rp 7.200.000. Selain itu, belanja bahan juga ikut naik sebesar Rp 19.535.250 yang sebelumnya sebesar Rp 12.039.850. Kenaikan ini menyebabkan pengeluaran tahun 2016 mengalami pembengkakan. Ditemukan juga pada laporan pertanggungjawaban tahun 2016 beberapa kali menunggak pembayaran listrik dan air. Lain halnya yang terjadi pada tahun 2017, terlihat pengeluaran biaya dapat dikendalikan. Hanya terjadi kenaikan biaya telepon, air dan listrik sebesar Rp 14.122.554 yang sebelumnya Rp 8.611.540.

Melalui penggunaan anggaran ini, dapat diketahui bahwa masih kurangnya perencanaan anggaran dan menunjukkan sumber daya manusia yang kurang cermat dalam mengelola keuangan.

Anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sepatutnya mengalami kenaikan sebagaimana yang telah diajukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

¹⁾Menteri Agama mengusulkan kenaikan anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi Rp 5.000.000 per bulan atau Rp 60.000.000 per tahun yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Kenaikan anggaran operasional KUA dikatakan wajar karena anggaran operasional mencakup seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun peruntukkan dan penggunaan biaya operasional menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu

1. Belanja Bahan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi jamuan tamu/rapat, dan penyelenggaraan operasional keperluan perkantoran,
2. Perjalanan dinas meliputi kegiatan koordinasi dan bimbingan masyarakat (penyuluhan),

3. Biaya internet pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI),

4. Biaya telepon, air, listrik (TAL).

1) Surat kabar "Kompas.com", 14 September 2017, halaman 1.

Penganggaran yang tidak tepat menandakan kurangnya koordinasi antara pihak legislatif sebagai otoritas pemegang anggaran dan pihak eksekutif sebagai pegimplementasi anggaran. Bendahara Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang saat diwawancarai, mengatakan "ada uang sedikit dari masyarakat, bisa dianggap sebagai uang sukarela yang digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional". Pernyataan Bendahara menunjukkan Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 menerima uang sukarela dari masyarakat yang akan menikah untuk menutupi defisit atau kurangnya anggaran operasional. Padahal secara gamblang telah disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan bahwa untuk keperluan operasional, Kantor Urusan Agama hanya mendapatkan anggaran operasional dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap bulannya. Jelas sekali tindakan ini menyimpang dari aturan yang telah dibuat ditambah lagi bisa menimbulkan rasa tidak percaya atau rasa curiga terhadap pelayan publik, serta membuka celah *illegal payment* (pungutan liar).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa akuntabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang belum akuntabel. Hipotesa ini berdasarkan laporan anggaran operasional tahun 2015-2017 dan beberapa literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendeskripsikan akuntabilitas anggaran operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1. Penelitian ini akan dilakukan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) sampai ke Kementerian Agama Kota Palembang. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan bahan evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang khususnya untuk penggunaan anggaran operasional yang akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana akuntabilitas anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui akuntabilitas anggaran operasional KUA Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat atau daerah dalam menetapkan kebijakan anggaran operasional, apakah sudah tepat atau belum.
2. Sebagai bahan informasi kepada Kantor Urusan Agama bersangkutan untuk mengkoreksi penganggaran yang telah dilakukan.
3. Sebagai acuan Kantor Urusan Agama bersangkutan untuk menggunakan anggaran operasional untuk program prioritas.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang anggaran khususnya anggaran operasional di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

Aminah, Andi. 2019. *Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Oleh Dewan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. Meraja Journal, Vol. 2,

No. 2, Juni 2019

Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Curtis J R., et al. 2008. *Integrating palliative and critical care: evaluation of a*

***qualityimprovement intervention*. Am J Respi Crit Care Med: Vol 178, Pp 269-275,**

[https://www.researchgate.net/publication/5371961_Integrating_palliative_and_criti](https://www.researchgate.net/publication/5371961_Integrating_palliative_and_critical_care_Evaluation_of_a_quality-improvement_intervention)

[al_care_Evaluation_of_a_quality-improvement_intervention](https://www.researchgate.net/publication/5371961_Integrating_palliative_and_critical_care_Evaluation_of_a_quality-improvement_intervention), 3 September 2019.

Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI. 2018. *Panduan Teknis Bendahara Penerimaan*. Jakarta: Direktorat

Sistem Perbendaharaan.

Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI. 2018. *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran*. Jakarta:

Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Henrayana, I Gede Yudi. 2010. *Dana Non-Budgeter*. Tangerang: Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara.

Juliana, Pipit dan Purweni Whidianningrum. 2017. *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan*

Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Universitas PGRI

Madiun, Vol 6, No. 2, https://doaj.org/article/3e97d9b4ffa84a0ab_f2d9473bf4300bd, 2

Desember 2018.

- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lionardo, Andreas. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Maani, Karjuni Dt. 2010. *Etika Pelayanan Publik*. Vol. IX, No.1, <https://ejournal.unp.ac.id>, 1 Maret 2019.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. Januari 2006. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 7, No.1, <https://doaj.org/article/e8692d347f4541ff95e334621acbe081>, 2 Desember 2018.
- Rakhmat. 2017. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Renaldo, Nicholas, dkk. 2016. Teori dan Kosep Penganggaran Sektor Publi, (Online), (academia.edu diakses 25 Maret 2020).
- Setiadi, M. Elly, dkk. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Schacter, Mark. 2000. *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*. Policy Brief No. 9, Institute On Governance: Canada.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi. Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sudirman, I Wayan. 2014. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFPE.

Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Widarsono, Agus. 2009. *Anggaran Sektor Publik*, (Online), (goeswids@yahoo.com, diakses 25 Maret 2020)

Sumber Internet

<http://journal.umy.ac.id/>
<https://e-resources.perpusnas.go.id>

Sumber Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 590 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 382 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Publik.